

**MANAJEMEN OBJEK WISATA PANTAI KARANG JAHE DI KABUPATEN
REMBANG**



Anisa Putri Nadina, Ida Hayu Dwimawanti
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 50139
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.com](mailto: fisip@undip.com)

Abstraksi

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang memberikan dampak positif melalui pengembangan sektor pariwisata sehingga menghasilkan objek wisata Pantai Karang Jahe yang termasuk dalam sepuluh besar wisata yang diminati oleh wisatawan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 dan tahun selanjutnya Pantai Karang Jahe mengalami penurunan peringkat karena terjadi penurunan jumlah wisatawan. Pantai Karang Jahe juga memiliki berbagai permasalahan dalam fungsi pelaksanaan manajemen objek wisata seperti kebersihan fasilitas, ketersediaan tempat sampah dan lahan parkir yang tidak luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi pelaksanaan pada manajemen objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan fungsi pelaksanaan belum berjalan dengan baik. Permasalahan dalam fungsi pelaksanaan, yaitu kebersihan di tempat usaha, kendala pengelolaan fasilitas gazebo, dan pemberian pelatihan yang tidak merata kepada anggota pengelola. Kualitas sumber daya dan anggaran manajemen objek wisata merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen objek wisata. Direkomendasikan semua pihak yang terlibat harus mematuhi peraturan yang telah dibuat.

Kata Kunci: Pariwisata; Manajemen objek wisata; Pantai Karang Jahe

Abstract

Kabupaten Rembang is a district in Central Java Province that has a positive impact through the development of the tourism sector so as to produce Karang Jahe Beach attractions which are included in the top ten tours of interest by tourists in Central Java Province in 2018 and the following year Karang Jahe Beach experienced a decline ranking due to a decrease in the number of tourists. Karang Jahe Beach also has various problems in the function of implementing tourism object management such as cleanliness of facilities, availability of trash cans and parking spaces that are not wide. This study aims to determine how the implementation function of the management of Karang Jahe Beach tourism object in Kabupaten Rembang. This study uses descriptive qualitative research methods with observation, interviews and documentation techniques to obtain research results. The results of the study indicate that the implementation function has not run well. Problems in the implementation function, namely cleanliness in the place of business, obstacles in managing gazebo facilities, and providing uneven training to management members. The quality of tourism object management resources and budget is an inhibiting factor in the implementation of tourism object management. It is recommended that all parties involved must comply with the regulations that have been made.

Keywords: Tourism; Tourist attraction management; Karang Jahe Beach

A. PENDAHULUAN

Letak geografis Negara Indonesia yang sangat strategis merupakan salah anugerah diberikan untuk masyarakat Indonesia sehingga negara ini memiliki limpahan kekayaan alam yang beragam yang berada di daratan maupun lautan. Sektor industri jasa yang dapat dikembangkan oleh masyarakat melalui pemanfaatan kekayaan alam atau sumber daya ialah sektor industri pariwisata. Pemanfaatan kekayaan alam untuk pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan melalui upaya pemerintah dengan tujuan meningkatkan peran sektor pariwisata nasional. Upaya ini membuahkan sebuah keberhasilan pengembangan sektor pariwisata yang dapat dilihat melalui pertumbuhan jumlah wisatawan, peningkatan kontribusi terhadap PDB, meningkatnya penerimaan devisa, pendapatan daerah yang bertambah, penerimaan investasi dan tenaga kerja yang meningkat, perluasan pasar usaha di wilayah

Indonesia, dan meningkatkan nilai sosial budaya dan lingkungan di Indonesia.

Aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian negara. Sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap devisa negara, pada tahun 2015 menyumbang sebesar 144 triliun, pada tahun 2016 menyumbang sebesar 176,23 triliun, pada tahun 2017 menyumbang sebesar 202,13 Triliun dan pada tahun 2018 menyumbang sebesar 224 Triliun. Sektor pariwisata juga menyerap banyak tenaga kerja di Indonesia, pada tahun 2018 sektor pariwisata berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 12,7 juta orang di Indonesia.

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia didukung oleh kinerja pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengembangan sektor pariwisata. Keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata didasarkan pada UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah pusat memberikan kebebasan otonomi yang besar dan luas

kepada daerah dengan harapan kesejahteraan masyarakat menjadi cepat terwujud melalui kualitas pelayanan yang meningkat dan pemberdayaan masyarakat daerah. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan di bidang pariwisata.

Berdasarkan data dari statistik pariwisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, jumlah objek wisata di Provinsi Jawa Tengah terus meningkat dari tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2016 jumlah peningkatan objek wisata sebesar 13%, tahun 2017 sebesar 10%, tahun 2018 sebesar 11% dan tahun 2019 sebesar 17%. Objek wisata di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah sebesar 51% dari tahun 2015 hingga 2019. Pengembangan objek wisata yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah wisatawan lokal yang berkunjung di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data dari Sumber: Buku Saku Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, jumlah wisatawan lokal

yang berwisata di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami peningkatan sebesar 52%. Pertumbuhan wisatawan yang terus meningkat di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh kontribusi pemerintah kota atau pemerintah kabupaten yang terus melakukan pengembangan di sektor pariwisata.

Kabupaten Rembang telah mengembangkan pariwisata lokalnya dan menjadikan pengembangan pariwisata sebagai salah satu misi yang digunakan untuk mewujudkan visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah tahun 2016-2021. Visi Kabupaten Rembang pada tahun 2016-2021 yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang ialah terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan. Salah satu misi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Rembang ialah meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan

ekonomi kreatif. Misi ini memiliki sasaran, yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah. Berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara membuat Kabupaten Rembang mempunyai banyak potensi wisata bahari yang dapat dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun dari daerah lain. Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki program pendukung seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan kemitraan pariwisata.

Jumlah wisatawan di Kabupaten Rembang dipengaruhi oleh banyaknya wisatawan yang berkunjung di objek wisata. Objek dan daya tarik wisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang memiliki ketertarikan untuk mengunjungi daerah wisata (Damanik et al., 2018). Pantai Karang Jahe merupakan objek wisata bahari yang diminati oleh wisatawan di Kabupaten Rembang dengan jumlah pendapatan sebesar Rp. 3.774.681.100 pada tahun 2019.

Berdasarkan data dari Buku Saku Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan 2020, pada tahun 2018 Pantai Karang Jahe menempati peringkat sembilan dari 692 objek wisata di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki daya tarik wisata dengan jumlah wisatawan sebesar 980.464 jiwa. Pada tahun 2019 Pantai Karang Jahe berada pada peringkat ke 46 dari 843 objek wisata dan tidak berhasil mempertahankan peringkatnya karena jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Karang Jahe menurun menjadi 272.903 jiwa sehingga tempatnya tergantikan oleh daya tarik wisata yang lain. Pantai Karang Jahe merupakan objek wisata yang dikelola secara langsung oleh masyarakat Desa Punjulharjo. Pengelolaan atau manajemen objek wisata di Pantai Karang Jahe dilaksanakan oleh Unit Pengelola Pantai Karang Jahe yang merupakan sub unit BUMDes Punjulharjo. Pembentukan sub unit ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga sebagai unsur perangkat daerah, yaitu memiliki tugas salah satunya dalam mengurus bidang pariwisata.

Manajemen objek wisata memiliki unsur dalam pelaksanaannya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau implementasi program, monitoring dan evaluasi (dalam Damanik & Teguh, 2012). Pengelolaan Pantai Karang Jahe masih terdapat beberapa permasalahan terutama dalam fungsi pelaksanaan dalam manajemen objek wisata. Crouch dan Ritchie (dalam Abdul Haji & Yusuf, 2016) mengungkapkan pengelolaan atraksi, aksesibilitas dan fasilitas fisik merupakan kegiatan dalam fungsi pelaksanaan. Pengelolaan objek wisata harus memperhatikan komponen wisata. Menurut Cooper (dalam Suwena, 2017) objek wisata harus mempunyai komponen utama, yaitu atraksi, fasilitas dan aksesibilitas wisata.

Peneliti melakukan observasi untuk menemukan permasalahan dalam fungsi pelaksanaan dalam manajemen

objek wisata. Manajemen objek wisata harus memenuhi fasilitas di objek wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung di objek wisata (Utari & Kampana, 2014). Fasilitas di objek wisata Pantai Karang Jahe memiliki masalah kebersihan disekitar fasilitas wisata. Fasilitas wisata di Pantai Karang Jahe yang memiliki masalah kebersihan adalah fasilitas tempat usaha. Kebersihan merupakan ciri dari kondisi lingkungan higienis (Rawung et al., 2021). Tempat sampah yang tidak memadai di area Pantai Karang Jahe menjadi permasalahan selanjutnya mengenai kebersihan yang ada di Pantai Karang Jahe. Toilet umum yang merupakan fasilitas wisata di Pantai Karang Jahe memiliki permasalahan kebersihan, yaitu lantai dan dinding toilet terlihat kotor. Darwis, Hendraningrum, dan Adriani (dalam Widyanti et al., 2020) mengungkapkan bahwa fasilitas toilet umum harus dikelola dengan baik, pengelola harus meninjau kebersihan, kesehatan dan kenyamanan toilet untuk wisatawan. Permasalahan selanjutnya manajemen objek wisata ialah

pengelolaan aksesibilitas objek wisata. Aksesibilitas yang ada di objek wisata Pantai Karang Jahe ialah lahan parkir kendaraan. Lahan parkir untuk kendaraan roda empat yang ada di Pantai Karang Jahe belum dapat menampung kendaraan yang digunakan wisatawan untuk berkunjung saat hari libur. Kondisi di tempat lahan parkir yang disediakan sangat tidak beraturan, banyak kendaraan roda empat yang memarkirkan kendaraannya di jalan yang digunakan sebagai akses para pengunjung. Menurut Tjiptono (dalam Suchaina, 2014), pengelolaan fasilitas yang baik akan membuat pandangan masyarakat yang berkunjung menjadi baik mengenai objek wisata. Peneliti merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang ada di Pantai Karang Jahe mengenai fungsi pelaksanaan pada manajemen objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang dan faktor penghambat dalam fungsi pelaksanaan pada manajemen objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang.

B. KAJIAN TEORI

Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki perpaduan yang rumit antara teori dan praktek dalam pelaksanaan, administrasi publik dalam pelaksanaannya memiliki tujuan untuk menyampaikan visi dan misi pemerintah kepada masyarakat dan membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Henry dalam Pasolong, 2013). Administrasi publik memiliki makna penting mengenai hakikat ilmu administrasi publik (Keban, 2015) makna tersebut, yaitu:

1. Bidang ilmu ini memiliki hal yang berkaitan dengan bidang legislatif, yudikatif dan dengan bidang eksekutif
2. Bidang ilmu ini mempunyai keterkaitan terhadap proses kebijakan publik, yaitu proses formulasi dan proses implementasi kebijakan
3. Bidang ilmu ini mengutamakan proses kerjasama dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan penyelesaian masalah masyarakat

4. Bidang ilmu ini memiliki peran yang tumpang tindih dengan administrasi swasta tetapi masih memiliki beberapa perbedaan.
5. Bidang ilmu ini memiliki sasaran dan tujuan untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat
6. Bidang ilmu ini memiliki dua aspek, yaitu aspek praktis dan teoritis

Manajemen Publik

Manajemen publik hadir karena adanya interaksi sosial. Menurut Suradinata (dalam Anggara, 2016), manajemen publik adalah aktivitas dengan memanfaatkan sumber yang dikelola oleh pemerintah untuk mencapai tujuan publik. Lynn (dalam Anggara, 2016) mengungkapkan bahwa manajemen publik dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang proses dan hasil. Manajemen publik sebagai proses adalah manajemen yang menerapkan demokrasi dalam proses pelaksanaannya terhadap rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen publik sebagai hasil adalah manajemen yang digunakan secara

efisien dalam pengelolaan sumber daya yang bersifat terbatas dengan menggunakan administrasi dalam pelaksanaannya.

Manajemen Objek Wisata

Manajemen objek wisata diperlukan agar tempat yang memiliki sesuatu yang menarik memiliki nilai manfaatnya yang terjaga untuk masyarakat. Manajemen objek wisata dapat diwujudkan oleh masyarakat yang mempunyai urusan dalam kegiatan manajemen ini. Menurut Osmankovik (dalam Damanik & Teguh, 2012) manajemen objek wisata merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasi antara *stakeholders* untuk menciptakan sebuah fenomena berwisata yang baik, kegiatan ini terdiri dari perencanaan wisata, promosi wisata, manajemen wisatawan dan pengelola serta pengembangan objek wisata.

Fungsi Manajemen Objek Wisata

Manajemen objek wisata memiliki sejumlah unsur yang secara umum

dapat diuraikan menjadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau implementasi program, monitoring dan evaluasi (Damanik & Teguh, 2012). Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Perencanaan

Inti utama dari tindakan manajemen adalah sebuah perencanaan yang jelas. Perencanaan ini dapat dilakukan untuk menentukan sumber daya dan rencana untuk mengembangkan pariwisata melalui penentuan tujuan, merumuskan anggaran, merumuskan sumber daya, merumuskan program manajemen dan rencana pembangunan fasilitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan sebuah unsur yang tidak dapat dilepaskan dalam manajemen objek wisata. Menentukan dan mengalokasikan sumber daya yang ada diorganisasi untuk melaksanakan pengelolaan objek wisata merupakan bagian dari pengorganisasian. Pengalokasian sumber daya tidak hanya

menempatkan dan memberikan pembagian tugas tapi juga mengatur metode pelaksanaan, serta menentukan sistem kompensasi untuk sumber daya yang sudah bekerja.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan pelaksanaan perencanaan yang didukung oleh sumber daya yang sudah diorganisasikan. Dalam fungsi ini pengelolaan fasilitas, atraksi, dan aksesibilitas merupakan hal yang penting. Pengelola juga harus melaksanakan promosi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan dalam fungsi ini, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan manajemen objek wisata sudah sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring komponen objek wisata seperti fasilitas, aksesibilitas dan atraksi dilaksanakan dengan tujuan agar pengelolaan komponen wisata dapat meningkatkan minat wisatawan

untuk berkunjung. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kinerja anggota dan kondisi fasilitas, atraksi dan aksesibilitas sudah cukup baik atau harus ditingkatkan.

Fungsi Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi program merupakan kegiatan untuk melaksanakan rencana-rencana program wisata dengan memaksimalkan sumber daya yang ada diorganisasi. Pelaksanaan dalam manajemen objek wisata harus memperhatikan komponen utama dalam objek wisata, menurut Cooper (dalam Suwena, 2017) objek wisata harus memiliki komponen utama yang terdiri dari atraksi wisata, fasilitas wisata dan aksesibilitas. Menurut Crouch dan Ritchie (dalam Abdul Haji & Yusuf, 2016). Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam proses pelaksanaan atau implementasi program, yaitu:

1. Pengelolaan atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas secara fisik yang digunakan oleh wisatawan. Menurut Crouch dan Ritchie (dalam Abdul

Haji & Yusuf, 2016) atraksi wisata adalah elemen utama yang menarik dari objek wisata dan berperan sebagai motivator utama bagi wisatawan untuk mengunjungi objek wisata. Spillane (dalam Saway et al., 2021) mengungkapkan fasilitas fisik merupakan sarana pelayanan yang diberikan oleh pengelola objek wisata kepada wisatawan agar wisatawan dapat menikmati perjalanan wisata dan mempermudah wisatawan saat berada di objek wisata. Aksesibilitas wisata yang baik terdiri dari kemudahan mencapai tujuan wisata melalui penyediaan rambu-rambu atau petunjuk jalan, dan kualitas jalan untuk menuju ke objek wisata (Zaenuri, 2012). Kemajuan pariwisata akan membuat peningkatan kehidupan penduduk di daerah.

2. Pemberian wewenang dalam pengelolaan objek wisata dilakukan oleh ketua agar bawahan dapat melaksanakan pengelolaan komponen wisata dengan baik.

Pendelegasian atau pemberian wewenang bertujuan agar anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memiliki tanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan (Rohman, 2017).

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini sangat penting karena dampak yang diberikan akan mempengaruhi kualitas pelayanan suatu objek wisata. Profesionalisme sumber daya manusia merupakan target penting yang harus didapatkan melalui aktivitas pengembangan sumber daya manusia di sektor wisata (Damanik & Teguh, 2012). Aktivitas pengembangan sumber daya manusia dapat dilaksanakan melalui pemberian pelatihan yang berkaitan dengan wisata.
4. Melakukan promosi maupun pemasaran destinasi pariwisata. Melaksanakan promosi wisata merupakan salah satu kegiatan inti dalam manajemen objek wisata (Damanik & Teguh, 2012). Promosi dapat dilakukan dengan berbagai

cara, yaitu promosi secara langsung atau memanfaatkan sosial media.

Faktor Penghambat Dalam Manajemen Objek Wisata

Faktor yang mempengaruhi manajemen objek wisata terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, teknologi dan lingkungan (Zaenuri, 2012). Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi yang menjadi pendukung atau penghambat manajemen objek wisata:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran dan pengaruh yang sangat penting dalam sektor pariwisata. Aspek sumber daya manusia salah merupakan mesin untuk menggerakkan kehidupan industri pariwisata di suatu negara (Setiawan, 2016). Sumber daya manusia di sektor pariwisata merupakan sumber daya yang harus ada di organisasi yang bergerak di sektor pariwisata. Sumber daya manusia yang baik akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki organisasi dalam mengelola wisata (Zaenuri, 2012). Dalam

pengelolaan atau manajemen sebuah objek wisata dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas karena pengelolaan wisata membutuhkan seseorang yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam manajerial, teknis dan memiliki kepemimpinan. Manusia yang memiliki pendidikan menjadi kebutuhan bagi organisasi karena memiliki wawasan untuk memecahkan masalah organisasi yang luas (Syafri & Alwi, 2014). Pelatihan juga merupakan alternatif upaya yang bisa dilakukan organisasi untuk meningkatkan kualitas pegawainya.

2. Anggaran

Faktor anggaran atau pendanaan pun tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan organisasi di sektor pariwisata. Tanpa ada anggaran yang memadai sesuai dengan anggaran belanja yang dibutuhkan, organisasi akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan menjadi kendala. Dana yang cukup untuk organisasi memberikan ketenangan

dalam menjalankan tugas dan menjadi kekuatan. Organisasi wisata akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki bila didukung oleh kemampuan sumberdaya salah satunya keuangan (Zaenuri, 2012). Tersedianya dana yang berlebihan dapat menjadi ancaman, ketika tidak didukung oleh SDM yang jujur dan profesional.

Pariwisata

Menurut Macintosh (dalam Yoeti, 2016), pariwisata adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh wisatawan yang menghasilkan sebuah tanda dan hubungan antara wisatawan dan organisasi yang melaksanakan pelayanan wisata, wisatawan dengan pemerintah dan wisatawan dengan masyarakat sebagai pemilik wisata. Leiper (dalam Yoeti, 2016) mengemukakan pariwisata terdiri dari unsur wisatawan, negara asal wisatawan, negara transit, dan negara tujuan wisatawan yang tergabung dalam skema terbuka yang saling berhubungan dalam lingkungan wisata.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pantai Karang Jahe, Desa Punjulharjo, Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan, yaitu *snowball sampling* dengan subjek penelitian yaitu Ketua Unit pengelola Pantai Karang Jahe sebagai informan pokok, Sekretaris Unit Pengelola Pantai Karang Jahe, Koordinator Kebersihan Pantai Karang Jahe, Bendahara BUMDes Punjolharjo, dan pelaku usaha Pantai Karang Jahe sebagai informan pangkal. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kualitas data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan penelitian, triangulasi, pengecekan anggota dan kecukupan referensi.

D. PEMBAHASAN

1. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan objek wisata Pantai Karang Jahe merupakan kegiatan mengelola komponen wisata melalui memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada diorganisasi. Pelaksanaan program ini meliputi komponen yang harus ada di dalam pariwisata. Komponen ini akan menjadi daya tarik wisata atau motivasi bagi wisatawan untuk berkunjung.

1.1 Pengelolaan Fasilitas Wisata

Unit Pengelola Pantai Karang Jahe sudah mengelola fasilitas gazebo dan kursi wisata dengan sangat baik walaupun memiliki permasalahan dengan warga terkait penggunaan fasilitas. Fasilitas gazebo yang disediakan oleh Unit Pengelola Pantai Karang Jahe terdiri dari enam buah dan dua buah lagi akan direncanakan pembangunannya. Unit Pengelola Pantai Karang Jahe juga menyediakan fasilitas kursi wisata yang dapat digunakan oleh wisatawan secara gratis seperti fasilitas gazebo. Permasalahan pengelolaan gazebo dan kursi wisata yang ada di Pantai Karang Jahe dikarenakan masyarakat memanfaatkan fasilitas ini sebagai tempat usaha dan

fasilitas yang berbayar sehingga wisatawan tidak dapat menggunakan fasilitas, unit pengelola sudah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui surat perjanjian tetapi tetap dilanggar oleh masyarakat. Unit Pengelola Pantai Karang Jahe belum berani untuk menegakkan aturan terkait penggunaan dan pemanfaatan fasilitas ini kepada masyarakat karena masyarakat merupakan tetangga atau saudara sendiri.

1.2 Pengelolaan Atraksi Wisata

Pengelolaan atraksi wisata sudah baik. Atraksi wisata yang ada di Pantai Karang Jahe dikelola sepenuhnya oleh masyarakat, Unit Pengelola Pantai Karang Jahe tidak memiliki atraksi wisata secara tetap dan hanya mengadakan acara. Pemasukan dari atraksi wisata sepenuhnya menjadi pendapatan masyarakat yang memiliki atraksi, Unit Pengelola Pantai Karang Jahe hanya menarik biaya retribusi kebersihan.

1.3 Pengelolaan Aksesibilitas Wisata

Pengelolaan aksesibilitas sudah cukup baik walaupun ada aksesibilitas wisata

yang rusak, yaitu penunjuk arah yang ada di luar pantai. Pantai Karang Jahe sudah mempunyai tempat parkir kendaraan yang untuk kendaraan roda empat dan roda dua. Terdapat penunjuk arah di Pantai yang dapat digunakan oleh wisatawan dan papan nama pantai sebagai identitas Pantai Karang Jahe.

1.4 Pemberian Wewenang dalam Pengelolaan Fasilitas, Atraksi, Dan Aksesibilitas

Ketua Unit Pengelola Pantai Karang Jahe sudah melakukan komunikasi secara langsung dan tidak langsung dalam pemberian kewenangan atau perintah. Komunikasi secara langsung dilakukan ketika ketua dapat hadir di Pantai Karang Jahe. Komunikasi tidak langsung dilakukan apabila ketua berhalangan hadir, komunikasi ini dilakukan melalui grup *Whatsapp* Pendelegasian atau pemberian wewenang bertujuan agar anggota dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan memiliki tanggung jawab terhadap wewenang yang diberikan (Rohman, 2017).

1.5 Kebersihan Objek Wisata

Pengelolaan kebersihan di Pantai Karang Jahe masih kurang. Unit Pengelola sudah mempunyai tenaga kebersihan untuk membersihkan Pantai tetapi mereka tidak ada setiap saat untuk membersihkan pantai dan hanya bekerja sebelum pantai dibuka untuk wisatawan dan setelah pantai ditutup. Wisatawan juga mengeluhkan mengenai kebersihan pantai.

1.6 Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia oleh Unit Pengelola Pantai Karang Jahe masih kurang. Pelatihan yang diberikan kepada anggota Unit Pengelola Pantai Karang Jahe yaitu pelatihan Gada Pratama, pelatihan SAR, pelatihan *tour guide*. Pelatihan ini diberikan oleh Unit Pengelola Pantai Karang Jahe, BUMDes Punjulharjo melalui kerjasama dengan pihak eksternal. Walaupun sudah ada pelatihan yang diberikan tetapi belum semua anggota mendapatkan pelatihan karena kuota pelatihan yang diberikan bersifat terbatas.

1.7 Promosi Objek Wisata

Promosi sudah dilakukan oleh pengelola Pantai Karang Jahe. Promosi memanfaatkan media sosial dilakukan oleh Unit Pengelola Pantai Karang Jahe. Unit Pengelola Pantai Karang Jahe memanfaatkan media sosial Instagram dan facebook untuk mempromosikan pantai dan memberikan informasi mengenai Pantai Karang Jahe. BUMDes Punjulharjo mempromosikan pantai secara langsung seperti hadir dalam pertemuan POKDARWIS dan masyarakat juga ikut mempromosikan secara langsung.

2. Faktor Penghambat Manajemen Objek Wisata Pantai Karang Jahe

2.1 Anggaran Manajemen Objek Wisata

Anggaran yang dimiliki oleh pengelola tidak memadai karena jumlah wisatawan menurun dan sumber anggaran berasal dari retribusi parkir kendaraan wisatawan dan biaya penggunaan fasilitas toilet oleh

wisatawan. Pantai Karang Jahe tutup dari bulan April hingga Juli pada tahun 2020 sehingga tidak mendapatkan pendapatan dari retribusi ataupun penggunaan fasilitas berbayar. Unit Pengelola Pantai Karang Jahe tetap harus membayar gaji anggota selama masa pandemi sehingga dana kas unit pengelola menjadi habis. Anggaran yang tidak memadai ini menyebabkan terbengkalainya pelaksanaan perencanaan salah satunya, yaitu perencanaan aksesibilitas.

2.2 Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia masih rendah karena anggota belum bekerja secara profesional dan banyak anggota yang memiliki riwayat pendidikan terakhir, yaitu SD, SMP, dan SMA dibandingkan anggota yang memiliki riwayat pendidikan D3 ataupun S1. Pendidikan tidak menjadi syarat dalam proses rekrutmen anggota. Pelatihan yang diberikan kepada anggota masih terbatas dan belum menyeluruh dan belum ada pelatihan wirausaha yang diberikan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Fungsi pelaksanaan pada manajemen objek wisata Pantai Karang Jahe belum optimal. Pantai Karang Jahe memiliki beberapa permasalahan terkait kebersihan fasilitas, penyediaan tempat sampah di tempat usaha, dan penggunaan fasilitas wisata oleh masyarakat, pemberian pelatihan yang belum merata. Pantai Karang Jahe memiliki fasilitas tempat ibadah, toilet, gazebo, kursi wisata, atraksi wisata yang sudah beragam, lahan parkir kendaraan yang luas, penunjuk arah pantai, dan papan nama di dalam panta, dan ketua sudah melakukan pemberian wewenang dalam pengelolaan komponen wisata secara langsung dan tidak langsung.

Anggaran merupakan faktor penghambat dalam manajemen objek wisata Pantai Karang Jahe. Selama masa pandemi, pendapatan Unit Pengelola Pantai Karang Jahe berkurang karena jadwal operasional pantai juga berkurang dan

menyebabkan dana kas pengelola habis. Pendapatan Pantai Karang Jahe berasal dari retribusi parkir kendaraan dan biaya penggunaan fasilitas toilet atau MCK. Dampak dari kekurangan anggaran ini adalah Unit Pengelola tidak dapat melaksanakan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Kualitas Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang menghambat manajemen objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Sumber daya manusia yang bertugas sebagai anggota Unit Pengelola Pantai Karang Jahe belum bekerja secara profesional karena masih kurangnya kualitas pendidikan anggota dan anggota berasal dari masyarakat Desa Punjulharjo. Selain itu Unit Pengelola belum memberikan pelatihan secara merata kepada anggota, pelatihan yang diberikan terbatas untuk diikuti oleh anggota.

2. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan manajemen objek wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang, peneliti

merekomendasikan beberapa saran, yaitu:

1. Unit Pengelola Pantai Karang Jahe dan BUMDes Punjolharjo harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang masih kurang seperti memberikan pelatihan pengelolaan objek wisata, pelatihan administrasi, dan pelatihan wirausaha untuk masyarakat.
2. Unit Pengelola Pantai Karang Jahe harus mempertegas pelaksanaan aturan terhadap masyarakat sebagai pelaku usaha, pemilik atraksi dan pemilik fasilitas mengenai kebersihan Pantai Karang Jahe dan pemanfaatan fasilitas wisata dan memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar aturan.
3. Masyarakat sebagai penerima manfaat, harus menjaga dan melestarikan lingkungan Pantai Karang Jahe sebagai objek wisata yang berbasis lingkungan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zanafa Publishing.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance* (Vol. 1). CV Pustaka Setia.
- Damanik, J., Rindrasari, E., Cemporaningsih, E., Marpaun, F., Raharjana, D. T., Brahmantya, H., & Wijaya. (2018). *Membangun Pariwisata dari Bawah*. Gadjah Mada University Press.
- Damanik, J., & Teguh, F. (2012). *Manajemen Destinasi Pariwisata Sebuah Pengantar Ringkas*. Kepel Press.
- Firmansyah, M. A. & B. W. M. (2018). *Pengantar Manajemen*. Deepublish Publisher.
- Hasibuan, M. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. (2014). *Organisasi dan Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Penerbit PT Bumi Aksara.
- Keban, T. Y. (2015). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Gaver Media.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (III). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardalena, S. &. (2017). *Pengantar Manajemen*. Deepublish Publisher.
- Moloeng, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pasolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pitana, I. G. (2012). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi.
- Prihati. (2015). *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Jakad Publishing.
- Rifa'i, M., & Fadhli, M. (2013). *Manajemen Organisasi*. Citapustaka Media Perintis.
- Rohman, A. (2017). *Dasar Dasar Manajemen*. Intelegensia Media. <https://doi.org/10.31227/osf.io/uk5yp>
- Suwantoro, G. (2009). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Andi.
- Suwena, I. K. & I. gusti N. W. (2017). *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Pustaka Larasan bekerjasama dengan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Denpasar.
- Teguh, J. D. & F. (2011). *Manajemen Destinasi Pariwisata Sebuah Pengantar Ringkas*. Kepel Press.
- Terry, G. R. & L. W. R. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Wardiyanta. (2010). *Metode Penelitian Pariwisata*. Andi.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *DASAR-DASAR MANAJEMEN*

Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien. PERDANA PUBLISHING.

Yoeti, O. A. (2016). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata.* Pranadnya Paramita.

Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan.* Kencana.

Zaenuri, M. (2012). PERENCANAAN STRATEGIS KEPARIWISATAAN DAERAH Konsep dan Aplikasi. In *e-Gov Publishing* (Vol. 1).

Jurnal

Abdul Haji, S., & Yusuf, I. S. H. (2016). PENGARUH ATRAKSI, AKSESIBILITAS, DAN FASILITAS TERHADAP CITRA OBJEK WISATA DANAU TOLIRE BESAR DI KOTA TERNATE. *Jurnal Penelitian Humano*, 7(2), 134–148.

Adrianto, Syamsurizaldi, dan Aidinil Zetra. (2018). Manajemen Program Pengembangan Destinasi Pariwisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci. *Jurnal administrasi dan Kebijakan Publik*, 3(3): 226-238.

Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management Dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 172–199.

Amalia, T., Ekwarso, H., & Taryono, T. (2017) Pengaruh Lingkungan Fisik terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan di Museum Daerah Sang Nila Utama Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 4(1):

1201-1214

Arhisondha, A. T. (2012). Pengaruh Media Sosial terhadap Minat Berkunjung Ulang wisatawan di taman Geopark Kabupaten Merangin. Pengaruh Media Sosial Terhadap Minat Berkunjung Ulang Wisatawan Di Taman Geopark Kabupaten Merangin. 13–14.

Kumawati, Ni Putu Yana Widiyari, & Firmani, Putu Siti. (2021). Pengaruh Atraksi dan Amenitas Wisata Terhadap Kepuasan Wisatawan Pada Twin Hill Stone Garden Kabupaten Bangli Tahun 2019: Influence Of Attractions and Amenitas Tour To The Satisfaction Of Tourists At Twin Hill Stone Garden District Of Bangli Year 2019. *Arthaniti Studies*, 1(2), 7-15.

Larasati, D. (2018). Pengelolaan Destinasi Wisata Alur Sungai Getuk Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Di Klaten Jawa Tengah. *Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta*.

Manafe, J. ., Setyorini, T., & Alang, Y. A. (2016). PEMASARAN PARIWISATA MELALUI STRATEGI PROMOSI OBJEK WISATA ALAM, SENI DAN BUDAYA (Studi Kasus di Pulau Rote NTT). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 101. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1687>

Marliani, L. (2018). METAMORFOSIS ADMINISTRASI NEGARA. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 1-7.

Putra, R. R., Siti Khadijah, U. L., & Rakhman, C. U. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penerapan Konsep Smart

- Tourism di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, July, 257. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2020.v07.i01.p12>
- Rawung, G. M., Laloma, A., & Londa, V. . Y. (2021). Pengelolaan Kebersihan Objek Wisata Benteng Moraya Di Tondano Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(99).
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata”: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. *Penataran*, 1(1).
- Suchaina, S. (2014). Pengaruh Kualitas Fasilitas Sarana dan Prasarana terhadap Peningkatan Jumlah Pengunjung Wisata Danau Ranu Grati. *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 2(2), 89-109.
- Suryani, Ni Luh Made, Piers Andreas Noak, dan I Putu Dharmanu Yudhartha. (2016). Analisis Manajemen Pengelolaan Obyek Wisata Dalam Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa Adat, Studi Kasus Obyek Wisata Pantai Pandawa Kuta Selatan Kabupaten Badung. *Jurnal Citizen Charter*, 1(1): 1-6.
- Susanto, B & Astutik, P. (2020). Pengaruh Promosi Media Sosial Dan Daya Tarik Wisata Terhadap Minat Berkunjung Kembali Di Obyek Wisata Edukasi Manyung. *Jurnal Riset Bisnis Dan Ekonomi*, xx(x), 46–56.
- Syamsuddin. (2017). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal IDAARAH*, 1(1), 60–73.
- Utari, P. S., & Kampana, I. M. A. (2014). Perencanaan Fasilitas Pariwisata (Tourism Amenities) Pantai Pandawa Desa Kutuh Kuta Selatan Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 2(1), 57–67.
- Wahdiniwaty, R. (2013). Aksesibilitas Wisata pada Kota Metropolitan di Negara Berkembang (Suatu Survey di Wilayah Bandung Raya). *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 11(2), 200–209. <https://repository.unikom.ac.id/30390/>
- Widyanti, N. L. S., Anggreni, M. A., Sumardiana, I. N. J., Yasti, H., & Kurniansah, R. (2020). Manajemen Pengelolaan Toilet Umum Di Daya Tarik Wisata Kuta Lombok Tengah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(1), 1-6.

Dokumen

Buku Saku Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Dokumen Data Pengurus Unit Pengelola Pantai Karang Jahe

Dokumen Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Pantai Karang Jahe Tahun 2020

Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2018

UU No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021